

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022

Agis Eles Sevigo*, Nurul Lathifah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Progra Studi Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: 1.*agis19sevigo@gmail.com, 2.n.lathifah@uinsa.ac.id

Email Penulis Korespondensi: agis19sevigo@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 data, yang diperoleh melalui metode interpolasi dengan mengacu pada data anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan software SPSS 25. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dengan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji f sebesar 0.002, sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hasil signifikansi uji t rasio efektivitas PAD sebesar 0,842 dan rasio efisiensi APBD sebesar 0,984, sehingga rasio efektivitas PAD dan Rasio efisiensi APBD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Sementara nilai signifikansi uji t rasio kemandirian sebesar 0,000, sehingga rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Kemandirian; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract—The study aims to test the impact of regional financial performance on economic growth in Sidoarjo District in 2013-2022. This research uses a quantitative approach with a type of descriptive research. The number of samples in this study is 34, which is obtained through the method of interpolation with reference to the APBD budget data of Sidoarjo district from the year 2013-2022. The study used a double linear regression analysis processed using SPSS 25 software. The data collection was carried out with a library study, with data sources coming from the Central Statistical Authority (BPS) and the Directorate-General for Financial Balances (DJPK) of the Ministry of Finance. The results of this study show that the significance value of the f test is 0.002, so it can be concluded that regional financial performance consisting of the PAD effectiveness ratio, APBD efficiency ratio, and independence ratio simultaneously has a significant effect on economic growth in Sidoarjo Regency. The significance of the t test results is that the PAD effectiveness ratio is 0.842 and the APBD efficiency ratio is 0.984, so that the PAD effectiveness ratio and APBD efficiency ratio have no effect on economic growth in Sidoarjo Regency. Meanwhile, the significance value of the independence ratio t test is 0.000, so the independence ratio has an effect on economic growth in Sidoarjo Regency.

Keywords: Regional Financial Performance; Efficiency Ratio; Effectiveness Ratio; Independence Ratio; Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan keuangan kepada daerah oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan ini, diperlukan dukungan dari semua pihak terkait. Hal ini penting agar daerah dapat menuju kemakmuran yang berkelanjutan (Christia & Ispriyarso, 2019). Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh masyarakat lokal mempengaruhi tingkat desentralisasi fiskal. Semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, semakin banyak fungsi dan jenis pajak yang diatur oleh daerah. Desentralisasi fiskal mencerminkan sejauh mana pemerintah pusat mendelegasikan wewenang fiskal kepada pemerintah daerah terpilih. Hal ini dapat memengaruhi otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri (Negara & Khoirunurrofik, 2021).

Besarnya kewenangan dalam mengelola keuangan yang diberikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah yang terpilih secara politik oleh masyarakat setempat menentukan tingkat desentralisasi fiskal suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintah, maka makin banyak fungsi yang dialihkan ke suatu daerah dan makin banyak pula jenis pajak yang diatur oleh daerah (Negara & Khoirunurrofik, 2021). Desentralisasi fiskal dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan pengumpulan pendapatan dan manajemen pengeluaran kepada pemerintah daerah. Namun, ada perdebatan yang mengakar mengenai apakah sistem ini dapat diterapkan di semua wilayah atau hanya di wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Faktanya, status desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang saat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Argumen dalam banyak kasus terletak pada apakah status ekonomi atau tingkat desentralisasi fiskal dilihat sebagai penyebab atau akibat dari yang lain apakah negara-negara yang kurang berkembang tidak cocok untuk sistem ini, atau apakah mereka kurang berkembang karena mereka tidak mempraktekkan sistem ini pada tingkat yang baik (Sima et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan wewenang besar kepada daerah dalam menyusun anggaran sendiri. Daerah dapat mengalokasikan sumber daya anggaran sesuai dengan kriteria kesesuaian, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Hal ini merupakan bagian dari strategi otonomi daerah yang memberikan kontrol lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Syukri & Hinaya, 2019). Kewenangan ini memungkinkan

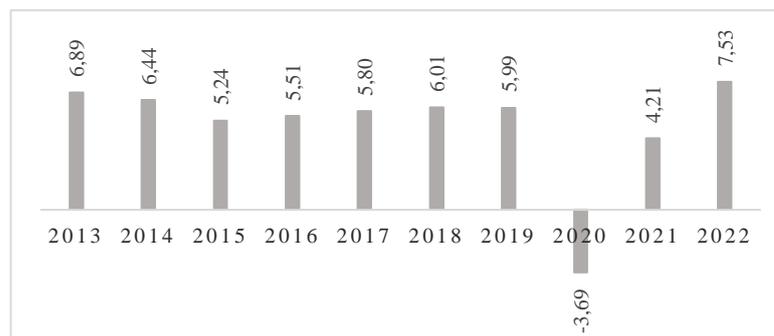
daerah mengelola keuangan secara efektif. Dana dapat dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal.

Tabel 1. Realisasi Total Pendapatan dan Realisasi Total Belanja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2022

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi Total Belanja	Selisih
2013	Rp2.695.270.157.665	Rp2.569.817.000.142	Rp125.453.157.523
2014	Rp3.273.379.955.995	Rp3.891.267.451.395	-Rp617.887.495.400
2015	Rp3.556.219.138.762	Rp3.662.799.265.945	-Rp106.580.127.183
2016	Rp3.668.041.957.747	Rp3.651.619.251.558	Rp16.422.706.189
2017	Rp4.045.685.362.113	Rp3.748.313.122.059	Rp297.372.240.054
2018	Rp4.332.577.984.768	Rp4.188.537.810.911	Rp144.040.173.857
2019	Rp4.444.626.346.625	Rp4.344.722.393.987	Rp99.903.952.638
2020	Rp4.411.615.214.582	Rp4.430.661.948.165	-Rp19.046.733.583
2021	Rp4.669.635.698.474	Rp4.936.099.885.355	-Rp266.464.186.881
2022	Rp4.527.040.080.387	Rp4.872.102.231.684	-Rp345.062.151.297

Pada tabel 1 tersebut di tahun 2013, pendapatan Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari belanja. Namun, pada tahun 2014 dan 2015, total belanja lebih tinggi dari total pendapatan. Mulai tahun 2016 hingga 2019, total pendapatan kembali melebihi total belanja. Kelebihan pendapatan dari belanja disebut dengan surplus anggaran dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja pemerintah, dan sumber pendapatan tambahan dapat mempengaruhi kondisi ini. Surplus anggaran menunjukkan kondisi keuangan yang sehat bagi Kabupaten Sidoarjo. Surplus anggaran daerah dapat digunakan untuk membayar utang, menyuntikkan modal ke proyek daerah, memberi pinjaman kepada pemerintah lain, atau disimpan sebagai cadangan untuk keperluan mendesak seperti pemilihan umum atau pembangunan infrastruktur (Kemenkeu, 2023). Dalam 3 tahun terakhir (2020-2022), terjadi Defisit Anggaran di mana Total Belanja melebihi Total Pendapatan. Hal ini dipicu oleh upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan belanja untuk mendukung perekonomian. Defisit anggaran juga dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang dapat mengurangi penerimaan pajak dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah memengaruhi indeks kesejahteraan. Peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syukri & Hinaya, 2019). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai ukuran efektivitas pembangunan ekonomi. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan persentase perubahan PDB, yang juga mempengaruhi beberapa wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Amalia & Akbar, 2022). Gambar 1 berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Sidoarjo di tahun 2013-2022



Gambar 1. Laju Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022

Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi pada periode 2013-2014. PDRB daerah ini tumbuh sekitar 6%, meskipun tantangan dan potensi masih menjadi fokus pemerintah dan pelaku ekonomi setempat. Tantangan utama adalah infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015-2016, Sidoarjo mengalami penurunan sekitar 5% akibat melemahnya perekonomian dunia yang berdampak pada hampir semua negara termasuk Indonesia (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2019). Kemudian ditahun 2017-2018 Kabupaten Sidoarjo secara perlahan-lahan menunjukkan kenaikan yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 6%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan disetiap sektornya mulai dari sektor industri dan juga jasa (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2019). Pada tahun 2019-2020, Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan drastis dari 6% menjadi -4% pada tahun 2020. Penyebab utamanya adalah pandemi Virus Corona yang melemahkan perekonomian global. Situasi ini memperlambat penerimaan pajak daerah dan berdampak pada daya beli masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja menjadi sulit. Persoalan seperti ini berhubungan dengan penerimaan pajak daerah (BPK Provinsi Jawa Timur, 2020).

Penelitian oleh Afira dan Fajar menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan (RP), rasio kemandirian (RK), dan rasio efektivitas (RE) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila. Namun, RE berkontribusi besar pada perluasan perekonomian di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa dana yang efisien

diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh RK, RE, dan RP (Amalia & Akbar, 2022).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Oktarini dan Fitri yang menyelidiki Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB Pemerintah Kota/Kabupaten Sumut dipengaruhi oleh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, dan rasio efektivitas pajak daerah. PDRB Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumut dipengaruhi positif oleh rasio kemandirian keuangan daerah, dan dipengaruhi negatif oleh rasio efektivitas pajak daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan analisis pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB (Siregar & Panggabean, 2021).

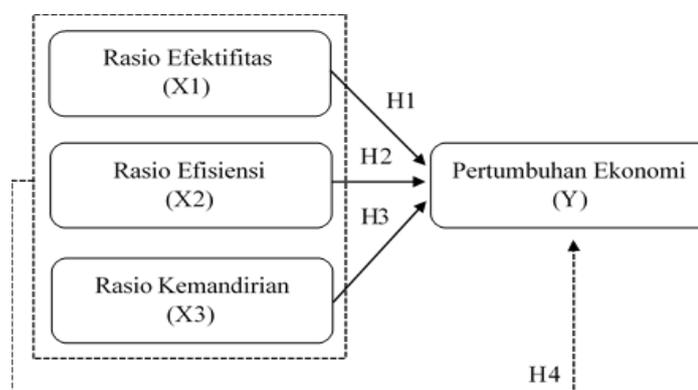
Ridho Rachman juga melakukan sebuah penelitian yang menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2011-2018, berdasarkan hasil penelitian, rasio Efektivitas PAD mempunyai dampak yang baik terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Tangsel. Dengan demikian, rasio efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh negatif terhadap perkembangan perekonomian Kota Tangsel, sedangkan kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan PAD secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Tangerang Selatan (Rachman, 2020).

Sudah banyak penelitian-penelitian di atas yang mengkaji tentang kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, masing-masing daerah memiliki karakteristik dan kesimpulan yang berbeda-beda, baik dari metode penelitiannya maupun pengaruhnya secara parsial dan simultan dengan periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013-2022.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan data sekunder dari publikasi Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan website resmi pemerintah yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Produk Domestik Regional Bruto dan Realisasi Anggaran selama sepuluh tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Pada penelitian ini mengacu pada (Rachman, 2020; Siregar & Panggabean, 2021). Regresi linier berganda digunakan dalam pengolahan data dan analisis data penelitian ini dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2, maka hipotesis yang digunakan adalah :

H1: Rasio Efektivitas berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

H2: Rasio Efisiensi berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

H3: Rasio Kemandirian berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

H4: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

2.2 Deskripsi Operasional Variabel

2.2.1 Rasio Efektivitas

Menurut Deswira, (2022) kemampuan pemerintah daerah saat melaksanakan PAD yang searah dengan tujuan APBD terdapat dalam rasio efektivitas PAD. Setiap tahunnya, tujuan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi

daerah pada tahun berjalan serta data prospektif dan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Semakin baik kompetensi daerah maka semakin tinggi pula rasio efektivitasnya (Kementerian Keuangan RI, 2020). Ketentuan pengukuran rasio efektivitas euangan daerah:

- Jika hasil pengukuran <100% maka menunjukkan tidak efektif
- Jika hasil pengukuran =100% maka menunjukkan efektif berimbang
- Jika hasil pengukuran >100% maka menunjukkan efektif

2.2.2 Rasio Efisiensi

Menurut Ulum dalam Maulina & Rhea, (2019) rasio efisiensi merupakan rasio yang menilai jumlah keuangan yang diperlukan guna mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang didapat merupakan definisi dari Rasio Efisiensi. Kinerja pemerintah daerah semakin bagus jika rasio efisiensinya semakin rendah. Dalam hal ini, biaya yang diperlukan untuk memungut PAD sepenuhnya dilakukan oleh organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan PAD. Ketentuan pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah:

- Jika hasil pengukuran <100% maka menunjukkan efisien
- Jika hasil pengukuran =100% maka menunjukkan efisien berimbang
- Jika hasil pengukuran >100% maka menunjukkan tidak efisien

2.2.3 Rasio Kemandirian

Menurut Deswira, (2022) Pemerintah daerah menggunakan Rasio Kemandirian untuk menilai apakah mereka dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan dan program untuk masyarakat sendiri atau apakah mereka masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan pinjaman daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ketentuan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah:

- Jika hasil pengukuran 0-25% maka menunjukkan pola hubungan instruktif
- Jika hasil pengukuran 25-50% maka menunjukkan pola hubungan konsultif
- Jika hasil pengukuran 50-75% maka menunjukkan pola hubungan partisipatif
- Jika hasil pengukuran 75-100% maka menunjukkan pola hubungan delegatif

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Keadaan kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan produksi dianggap sebagai tanda kemajuan atau pembangunan ekonomi. Peningkatan taraf hidup yang ditentukan oleh produksi output per orang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (Ridwan & Nawir, 2021). Selain itu Prawoto, (2019) juga memberikan definisi dari p roses peningkatan produksi per kapita dalam jangka panjang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Ada tiga hal yang disoroti dalam definisi ini: Jangka panjang, produksi per kapita, dan proses. Konsep ini juga menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi berkembang dan bertransformasi sepanjang waktu. PDB per kapita dihitung dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan PDB per kapita atau output dapat digunakan untuk mencirikan peningkatan kualitas hidup masyarakat umum di suatu negara. Para ekonom telah lama mempunyai beragam keyakinan mengenai variabel-variabel yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan produksi per kapita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data

3.1.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini menggunakan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menilai pencapaian keuangan daerah dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun sejak 2013-2022. Ada tiga analisis untuk mengukur kinerja keuangan daerah melalui rasio, yaitu rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2013	Rp858.433.670.218	Rp721.795.000.000	119%	Efektif
2014	Rp1.115.332.938.500	Rp919.706.000.000	121%	Efektif
2015	Rp1.266.786.727.409	Rp1.090.575.714.494	116%	Efektif
2016	Rp1.335.283.958.793	Rp1.203.782.695.817	111%	Efektif
2017	Rp1.671.806.819.697	Rp1.310.069.237.292	128%	Efektif
2018	Rp1.685.558.666.147	Rp1.431.052.747.437	118%	Efektif
2019	Rp1.689.953.213.263	Rp1.603.002.870.000	105%	Efektif
2020	Rp1.798.515.529.275	Rp1.810.100.000.000	99%	Tidak Efektif

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2021	Rp1.921.244.253.336	Rp1.609.820.835.819	119%	Efektif
2022	Rp1.823.873.029.127	Rp1.816.972.659.380	100%	Efektif Berimbang
	Rata-Rata		114%	

Pada perhitungan tabel 2, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sudah efektif dengan kriteria diatas 100%. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 128% sementara terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 99% dengan rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sebesar 114%.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisiensi APBD

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2013	Rp2.569.817.000.142	Rp2.695.270.157.665	95%	Efisien
2014	Rp3.891.267.451.395	Rp3.273.379.955.995	119%	Tidak Efisien
2015	Rp3.662.799.265.945	Rp3.556.219.138.762	103%	Tidak Efisien
2016	Rp3.651.619.251.558	Rp3.668.041.957.747	100%	Efisien Berimbang
2017	Rp3.748.313.122.059	Rp4.045.685.362.113	93%	Efisien
2018	Rp4.188.537.810.911	Rp4.332.577.984.768	97%	Efisien
2019	Rp4.344.722.393.987	Rp4.444.626.346.625	98%	Efisien
2020	Rp4.430.661.948.165	Rp4.411.615.214.582	100%	Efisien Berimbang
2021	Rp4.936.099.885.355	Rp4.669.635.698.474	106%	Tidak Efisien
2022	Rp4.872.102.231.684	Rp4.527.040.080.387	108%	Tidak Efisien
	Rata- Rata		102%	

Pada perhitungan tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 tidak efisien dengan kriteria diatas 100%. Rasio terbaik terjadi di tahun 2019 sebesar 98% sementara terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 119% dengan rata-rata rasio efisiensi APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sebesar 102%.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Bantuan Pemerintah Pusat & Pinjaman	Rasio Kemandirian	Keterangan
2013	858.433.670.218	1.311.016.195.099	65%	Sedang (Partisipatif)
2014	1.115.332.938.500	1.402.935.437.170	79%	Tinggi (Delegatif)
2015	1.266.786.727.409	1.388.639.002.033	91%	Tinggi (Delegatif)
2016	1.335.283.958.793	1.690.087.946.119	79%	Tinggi (Delegatif)
2017	1.671.806.819.697	1.708.887.132.594	98%	Tinggi (Delegatif)
2018	1.685.558.666.147	1.793.474.341.790	94%	Tinggi (Delegatif)
2019	1.689.953.213.263	1.779.140.856.326	95%	Tinggi (Delegatif)
2020	1.798.515.529.275	1.711.271.242.511	105%	Tinggi (Delegatif)
2021	1.921.244.253.336	2.562.511.334.042	75%	Sedang (Partisipatif)
2022	1.823.873.029.127	2.699.903.720.332	68%	Sedang (Partisipatif)
	Rata-Rata		85%	

Pada perhitungan tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 tinggi (delegatif) dengan kriteria diantara 75% - 100%. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 105% sementara terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 68% dengan rata-rata rasio efisiensi APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2022 sebesar 85%. Ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu atau mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

3.1.2 Statistik Data Penelitian

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan sebagai analisis regresi linear berganda yang menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai variabel independen (X) serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y). Dalam konteks ini, statistik deskriptif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang distribusi dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
PDRB (Y)	1.4876	.32837	34
REP (X1)	115.88	8.720	34
REA (X2)	102.09	9.599	34
RKKD (X3)	82.12	12.002	34

Dari hasil tabel 5 menunjukkan rasio efektivitas PAD mempunyai mean sebesar 115.88, rasio efisiensi APBD sebesar 102.09, dan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 82.12, serta untuk variabel pertumbuhan ekonomi

sebesar 1.4876 dimana keseluruhan data sampel sebanyak 34. Peneliti menggunakan jumlah sampel sebanyak 40 didapat dengan metode interpolasi yang mana data kuartal digunakan sebagai data penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode interpolasi tujuannya untuk memenuhi kriteria penelitian, yang dimana menurut Roscoe dalam Amin et al., (2023) ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 dan 500. Akan tetapi setelah dilakukan analisis menggunakan metode Outlier Boxplot terdapat 6 sampel data ekstrem, sehingga peneliti hanya menggunakan 34 sampel keseluruhan data yang dikumpulkan.

3.1.3 Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.1.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji distribusi normal adalah untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal. Jika nilai residual yang distandarisasi berada di sekitar mean, maka data dikatakan terdistribusi normal. Uji ini hanya dapat dilakukan pada data multivariat. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai Sig (2-tailed) > 0,05, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25597942
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.083
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai koefisien signifikan (Asymp.sig) sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari syarat signifikansi 0,05. Sehingga bahwa data ada pada penelitian ini berdistribusi normal.

3.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen dilakukan Uji Multikolinearitas. menggunakan teknik Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance untuk mencari multikolinearitas. Multikolinearitas antar variabel independen diduga terjadi jika nilai VIF lebih dari 10. Diduga tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar 0,01.

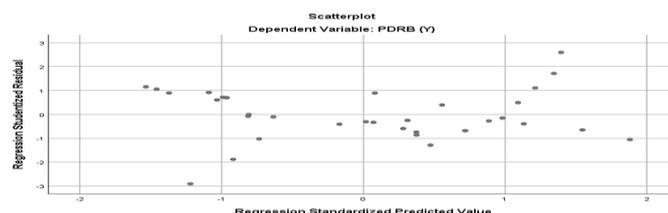
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
REP (X1)	.880	1.136
REA (X2)	.966	1.035
RKKD (X3)	.862	1.160

Pada pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk variabel rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), dan rasio kemandirian keuangan daerah (X3) sebesar 1.136, 1.035, dan 1.160 nilai tersebut lebih kecil dari syarat pengujian multikolinearitas yaitu 10.00 sehingga dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

3.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak dapat diuji dan tidak tepat, hal ini juga mempersulit proses pendugaan parameter regresi (koefisien). Tabel scatterplot dapat digunakan untuk menganalisisnya; jika titik-titiknya tersebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 3 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan Scatterplot, dapat dilihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.

3.1.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi merupakan hubungan yang terdapat di suatu penelitian dimana terdapat korelasi antara anggota suatu observasi dengan anggota observasi lainnya. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson, apabila nilai tersebut berada diantara dl dan du maka tidak terjadi Autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.390	.327	.21994	1.683

Berdasarkan hasil uji autokorelasi nilai Durbin Watson sebesar 1.683 dan kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan signifikansi 0,05 melalui rumus $(k ; N)$ jumlah variabel (k) dalam penelitian ini yaitu 3 dan jumlah sampel (N) sebanyak 34, maka $(k ; N) = (3 ; 34)$. Berdasarkan tabel Durbin Watson nilai dl sebesar 1.651 dan du sebesar 2.349. Sehingga nilai Durbin Watson terletak diantara nilai dl dan du yang menghasilkan kesimpulan tidak terdapat autokorelasi.

3.1.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan minimal dua variabel independen dan maksimal satu variabel dependen, pendekatan ini menggabungkan lebih dari dua variabel. Intinya, hubungan parsial atau simultan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen dipahami melalui penerapan regresi berganda. Berikut merupakan persamaan dari regresi linear berganda.

Tabel 9. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.991	.865		3.459	.002
REP (X1)	-.001	.006	-.030	-.201	.842
REA (X2)	.000	.005	.003	.020	.984
RKKD (X3)	-.017	.004	-.615	-4.009	.000

Pada tabel 9 hasil uji regresi linear berganda menunjukkan antara rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), rasio kemandirian keuangan daerah (X3), dan pertumbuhan ekonomi (Y) memiliki nilai koefisien regresi masing-masing dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 2.991 - 0.001X1 + 0.000X2 - 0.017X3$ dimana Y merupakan pertumbuhan ekonomi, sementara X1 rasio efektivitas PAD, X2 rasio efisiensi APBD, dan X3 rasio kemandirian keuangan daerah. Nilai konstanta sebesar 2.991 menunjukkan jika tidak ada variabel rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), rasio kemandirian keuangan daerah (X3), maka pertumbuhan ekonomi bernilai 2.991.

Nilai koefisien rasio efektivitas PAD sebesar -0.001 menunjukkan jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi berkurang sebesar 0.001. Nilai koefisien rasio efisiensi APBD sebesar 0.000 menunjukkan jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efisiensi APBD mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan apapun. Nilai koefisien rasio kemandirian keuangan daerah sebesar -0.017 menunjukkan jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi berkurang sebesar 0.017.

3.1.3.6 Uji T

Uji parsial, yang sering disebut dengan uji t, merupakan salah satu uji koefisien regresi yang memverifikasi kepentingan parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan kriteria signifikansi 0,05 dan diuji dengan 2 sisi. Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan yaitu jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan t tabel dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042 dengan ketiga variabel telah diuji dan menghasilkan uji sebagai berikut:

- Berdasarkan pada tabel 9 nilai t hitung rasio efektivitas PAD sebesar -0.201 dan t tabel sebesar 2.042 $(-0.201 < 2.042)$ sehingga dapat disimpulkan rasio efektivitas PAD (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.
- Berdasarkan pada tabel 9 nilai t hitung rasio efisiensi APBD sebesar 0.020 dan t tabel sebesar 2.042 $(0.020 < 2.042)$ sehingga dapat disimpulkan rasio efisiensi APBD (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.
- Berdasarkan pada tabel 9 nilai t hitung rasio efisiensi APBD sebesar -4.009 dan t tabel sebesar 2.042 $(-4.009 > 2.042)$ sehingga dapat disimpulkan rasio kemandirian keuangan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.

3.1.3.7 Uji F

Menentukan apakah variabel independen dan dependen mempunyai pengaruh satu sama lain secara simultan atau kombinasi merupakan tujuan dari uji F. Metode yang digunakan adalah dengan mencoba membuktikan hipotesis dengan cara menyamakan f hitung dengan f tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan menggunakan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$. Variabel dalam proses ini dilambangkan dengan k , sedangkan jumlah responden dilambangkan dengan n . Jika f hitung $>$ f tabel maka terdapat pengaruh secara simultan pada penelitian. Nilai F tabel dengan signifikansi 0.05 dan nilai derajat kebebasan $df = (34-3-1)$ yaitu 30 sehingga di peroleh nilai F tabel sebesar 2.92. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Uji F Smimultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.396	3	.465	6.455	.002 ^b
Residual	2.162	30	.072		
Total	3.558	33			

Pada tabel 10 nilai signifikansi sebesar 0.002 yaitu lebih kecil dari 0.05 ($0.002 < 0.05$) dengan F hitung sebesar 6.455 yaitu lebih besar dar 2.92 ($6.455 > 2.92$) sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), dan rasio kemandirian (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Sidoarjo.

3.1.3.8 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi, sering kali dilambangkan dengan simbol R Square, berfokus terutama pada sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika koefisien determinasi model regresi tetap kecil atau mendekati nol, maka semua variabel independen mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai R Square mendekati 100% maka seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji F Smimultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.390	.327	.21994	1.683

Pada tabel 11 nilai koefisien Adjusted R Square yaitu 0.327 atau sama dengan 32,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD (X1), rasio efisiensi APBD (X2), dan rasio kemandirian (X3) mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 32,7\% = 67,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Secara Parsial Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung $<$ t tabel ($-0.201 < -2.042$). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Akbar, (2022) dan Siregar & Panggabean, (2021) dimana penelitiannya tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apabila kita lihat rata-rata rasio efektivitas PAD pada tabel 2 sudah dikategorikan efektif dengan angka 114%. Akan tetapi bila diamati kembali terlihat bahwa tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dan hal tersebut juga terjadi ditahun 2022. Hal ini disebabkan kontribusi atau pengalokasian dana PAD dalam penelitian ini tidak digunakan secara tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Karena pengalokasian dana PAD yang tepat akan menghasilkan efektivitas PAD guna kepentingan masyarakat. Azimi, (2020) menambahkan bahwa inisiatif-inisiatif yang ada saat ini gagal memenuhi harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah pelayanan yang tidak memadai, kebijakan yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pendapatan per-kapita, serta transfer dana dari pusat yang tidak dikelola dengan baik.

3.2.2 Pengaruh Secara Parsial Rasio Efisiensi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung $<$ t tabel ($0.020 < 2.042$). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al., (2020) dimana penelitiannya tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bisa kita lihat pada tabel 3 pengukuran rasio efisiensi APBD, rata-rata nilai rasio dengan kurun waktu 10 tahun menunjukkan kategori tidak efektif. Selain itu terlihat bahwa mulai tahun 2014 sampai dengan 2022 cenderung membentuk garis lurus yang membuktikan bahwa belum ada perubahan untuk memaksimalkan belanja daerahnya yang menyebabkan rasio efisiensi APBD tidak efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengalokasikan belanja daerahnya untuk kebutuhan di beberapa wilayah yang memang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Utami et al., (2020) juga menambahkan Rasio efisiensi yang tinggi pada suatu daerah menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah semakin menurun karena Pemerintah Daerah kurang mampu mengurangi belanja daerah, sehingga rasio efisiensi berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

3.2.3 Pengaruh Secara Parsial Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan t hitung $>$ t tabel ($-4.009 > -2.042$). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afif & Ciptawaty (2020) dimana penelitiannya berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah semakin berkurang yang menjadikan suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dilihat dari keuangan daerahnya. Menurut Deswira, (2022) kemandirian untuk menilai kinerja mereka dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan dan program untuk masyarakat sendiri atau masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Afif & Ciptawaty (2020) juga menambahkan, ciri-ciri utama suatu daerah yang mampu mencapai otonomi adalah: 1) Kapasitas keuangan daerah adalah kemampuan dan kekuasaan daerah dalam memeriksa dan mengelola keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan. 2) Bantuan pemerintah pusat harus dikurangi semaksimal mungkin, sehingga pendapatan daerah menjadi sumber pendanaan utama dan berperan lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.4 Pengaruh Secara Simultan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pada hasil data yang menggunakan analisis regresi linear berganda, bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo. Hal itu dapat diketahui melalui pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan f hitung $>$ f tabel ($6.455 > 2.92$). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al., (2021) dimana secara simultan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya keuangan daerah, ketiga rasio tersebut dapat berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi karena saling terkait dan mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi ketiga rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan daerah dan semakin besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan secara parsial tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022. Hal ini disebabkan dana dalam penelitian ini tidak digunakan secara tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud. Karena pengalokasian pad yang tepat akan menghasilkan efektivitas pad guna kepentingan masyarakat. Faktor eksternal seperti kebijakan daerah, kondisi ekonomi daerah, atau faktor geografis dan demografis memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daripada kinerja keuangan daerah secara langsung. Kemudian secara parsial tidak terdapat pengaruh antara rasio efisiensi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022. Rata-rata nilai rasio dengan kurun waktu 10 tahun menunjukkan kategori tidak efektif. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengalokasikan belanja daerahnya untuk kebutuhan di wilayahnya agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari rasio efisiensi APBD memiliki dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi, karena beberapa faktor yang memiliki pengaruh lebih dominan. Lalu secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah semakin berkurang yang menjadikan suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dilihat dari keuangan daerahnya. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, Kabupaten Sidoarjo dapat mengalokasikan dana secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah. Kemudian secara simultan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi APBD, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2022, ketiga rasio tersebut dapat

berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi karena saling terkait dan mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi ketiga rasio tersebut, semakin baik kinerja keuangan daerah dan semakin besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi APBD, meskipun penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tidak secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui, yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini tentunya mempunyai kekurangan yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) Dengan hanya menggunakan 34 data yang diperoleh dari metode interpolasi data, kemungkinan terjadi bias akibat representasi data yang kurang dapat dihindari, (2) Dengan hanya menggunakan 3 rasio keuangan daerah, analisis yang dilakukan mungkin tidak mampu menggambarkan kompleksitas fenomena yang diteliti secara menyeluruh, (3) Dalam penelitian yang hanya memperhatikan satu wilayah, hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada wilayah lain atau secara umum.

REFERENCES

- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 609. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p02>
- Amalia, A. R., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Gerbangkertosusila). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 80–101.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Azhari, M., Zulfa, A., & Murtala, M. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3427>
- Azimi, A. (2020). Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas dan Kemampuan Fiskal pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jkubs*, 1(1), 92–109.
- BPK Provinsi Jawa Timur. (2020). Target Penerimaan Pajak Kabupaten Sidoarjo Terkoreksi Akibat Covid-19. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/target-penerimaan-pajak-kabupaten-sidoarjo-terkoreksi-akibat-covid-19/>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam>
- Kemenkeu, D. (2023). Apa yang dimaksud dengan surplus apbd dan bagaimana tindak lanjutnya. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>
- Kementerian Keuangan RI, D. P. K. (2020). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22. <https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2019). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. In *Industry and Higher Education*. https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP_37_TH_2019.pdf
- Prawoto, N. (2019). Pengantar Ekonomi makro. Rajawali Pers.
- Rachman, R. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2018. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Pustaka Belajar.
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27–37. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/download/1154/1024>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Utami, R. O. D., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1).